

PENGELOLAAN LAYANAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KELURAHAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

Karina Septiani, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 2, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Layanan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Sambutan Kota Samarinda.

Pengarang : Karina Septiani

NIM : 1902016107

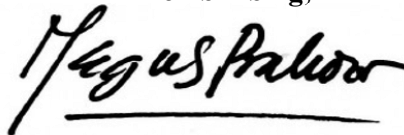
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 26 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si.

NIP 197411202005011001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan :	eJournal Administrasi Publik
Volume :	14
Nomor :	2
Tahun :	2026
Halaman :	268-275

PENGELOLAAN LAYANAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KELURAHAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

Karina Septiani ¹, Cathas Teguh Prakoso ²

Abstrak

Penerangan jalan (PJU) merupakan infrastruktur penting yang meningkatkan keselamatan lalu lintas, mencegah kejahatan, dan mendorong aktivitas ekonomi di malam hari. Namun demikian, di Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda, penyediaan layanan penerangan jalan masih kurang memadai, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya jalan yang tidak berlampu dan kerusakan fasilitas yang belum teratasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi pengelolaan layanan penerangan jalan di Kelurahan Sambutan sekaligus mengenali faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kerangka kerja manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) George R. Terry. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka analitis yang dibuat oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil Penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan Dinas Perhubungan dan situasi aktual. Meskipun perencanaan dan struktur organisasi telah terbentuk, implementasi dan pengawasan masih terkendala oleh respon perbaikan yang lamban serta lemahnya validasi kondisi riil di titik-titik rawan. Efektivitas pengelolaan semakin terhambat oleh faktor eksternal seperti pencurian komponen, kerusakan akibat cuaca, serta kendala operasional berupa keterbatasan suku cadang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan digitalisasi sistem pengaduan, peningkatan frekuensi patroli lapangan, dan perbaikan manajemen logistik guna mempercepat pemulihan layanan public.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Penerangan Jalan Umum (PJU), Pelayanan Publik, Dinas Perhubungan*

Pendahuluan

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat umum adalah penerangan jalan umum (PJU). Sebagai pegawai negeri dan pegawai negara, pelayanan adalah tanggung jawab utama dan terpenting dari aparat tersebut. Ayat keempat pembukaan UUD 1945 menguraikan kewajiban ini secara rinci. Hal ini mencakup empat aspek pelayanan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: karinaseptiani13092000@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

utama aparat kepada masyarakat: melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tanah air, meningkatkan kesejahteraan umum, mendidik masyarakat, dan membangun tatanan dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jalan raya merupakan komponen vital dari infrastruktur transportasi, memainkan peran penting dalam pengiriman barang dan jasa, meningkatkan perekonomian, dan berkontribusi pada aspek sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk meningkatkan efektivitas jalan, diperlukan struktur tambahan, seperti penerangan jalan. Penerangan jalan yang memadai dapat membantu mengurangi angka kecelakaan di malam hari, terutama di jalan yang sering dilalui kendaraan roda dua dan jalan yang berpotongan dengan kawasan permukiman.

Penerangan jalan umum, yang biasa dikenal sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU), memainkan peran penting dalam pengembangan suatu wilayah atau kota. Penerangan Jalan Umum berperan sebagai pedoman navigasi pengguna jalan di malam hari, meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, menambah unsur estetika, dan juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi 2 suatu daerah. Namun, sayangnya banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam menyuplai fasilitas publik yang sangat krusial ini, terutama dalam hal merencanakan sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) yang hemat energi (Rudini dkk 2021).

Banyak pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mendanai pengelolaan operasional lampu jalan mereka karena biaya energi yang tinggi yang harus dibayarkan kepada penyedia listrik, PT PLN (Persero), terutama dalam hal penambahan lampu jalan baru. Kondisi ini menghambat masyarakat untuk menikmati penerangan lampu jalan secara maksimal pada malam hari, sehingga membuat efisiensi energi lampu jalan menjadi sangat penting (Rudini dkk 2021).

Samarinda, yang merupakan pusat pemerintahan Kalimantan Timur, masih menghadapi masalah dalam hal infrastruktur penerangan jalan, karena banyak jalannya yang tetap tidak terang. Upaya Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menyediakan penerangan jalan masih jauh dari kata memadai. Bahkan ketika tersedia, beberapa lampu jalan tidak berfungsi akibat kurangnya perhatian dalam perawatannya. Perawatan sangat diperlukan untuk memastikan lampu penerangan jalan dapat berfungsi dengan baik.

Kelurahan Sambutan memiliki 29 ruas jalan, namun berdasarkan data di atas penerangan jalan hanya ada pada 3 ruas jalan, kemudian pada perencanaan hanya ada pada 6 ruas jalan. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak ruas jalan yang belum mendapatkan penerangan jalan, terutama pada jalan padat penduduk dan jalan rawan laka.

Di Kelurahan Sambutan, penerangan jalan umum perlu diperhatikan karena beberapa tiang yang ada perlu diganti karena rusak, dan bahkan ada bohlam yang hilang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, saat ini di Kelurahan Sambutan, sebagian besar penerangan jalan umum masih

mengandalkan PJU yang mengonsumsi listrik berlebihan, sedangkan hanya sebagian kecil jalan yang menggunakan lampu LED.

Salah satu manifestasi dari pengabaian pemerintah daerah terhadap pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum terlihat dari kurangnya peraturan daerah yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah penerangan jalan umum di Kelurahan Sambutan, yang selanjutnya memperparah kelambatan Dinas Perhubungan dalam menangani masalah penerangan jalan umum tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti masih banyak jalan yang ada di Kecamatan Sambutan tidak memiliki lampu penerangan jalan umum. Ini menunjukkan Dinas Perhubungan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai entitas terkait, padahal penerangan jalan merupakan salah satu dari tujuh bentuk pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat atas barang publik (kebutuhan publik) yang mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam memenuhi kebutuhan publik tersebut, pemerintah harus mengelolanya dengan baik agar penyelenggaraanya dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan elemen layanan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pemerintah kota harus memastikan ketersediaannya melalui komitmen finansial dan material. PJU merupakan bagian penting dari infrastruktur publik yang mempunyai dampak positif yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai salah satu kota pendukung ibu kota, Kota Samarinda memiliki banyak pengemudi, sehingga penerangan jalan menjadi bantuan penting di pinggir jalan untuk keselamatan mereka.

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Pengelolaan merupakan komponen dari administrasi. Pengelolaan mencakup beberapa proses administratif yang memerlukan fokus pada praktik kerja yang efektif, koordinasi tugas, pembimbingan, dan pengawasan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan, yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan aset tambahan untuk memenuhi tujuan yang dimaksud, dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan penerangan jalan (Nugroho, 2003).

Penerangan Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum (PJU) mengacu pada penerangan jalan dan fasilitas umum yang secara resmi didirikan oleh pemerintah atau entitas berwenang lainnya dan secara legal dilengkapi dengan listrik. Penerangan jalan umum merupakan komponen infrastruktur jalan yang dapat ditempatkan di kedua sisi jalan dan/atau di tengah (di median) untuk memberikan penerangan bagi jalan raya dan area sekitarnya sesuai kebutuhan, termasuk jalan layang, jembatan, dan terowongan yang melayani kepentingan umum (Aris 2009).

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Pengelolaan penerangan jalan merupakan layanan infrastruktur publik penting yang meningkatkan keselamatan dan mobilitas masyarakat. Peran utama penerangan jalan adalah untuk menyediakan penerangan yang cukup di jalan umum, memungkinkan pengguna jalan untuk melihat dengan baik dan merasa aman saat berkendara atau berpartisipasi dalam kegiatan setelah gelap. Layanan ini merupakan komponen penting dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan transportasi bagi setiap warga negara. Melalui penerangan yang memadai, pemerintah membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dinamis bagi warga, mendorong pergerakan yang lancar dan keterlibatan sosial di area komunal. Dengan demikian, penerangan jalan merupakan komponen penting dari layanan infrastruktur publik yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Dewi 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kerangka kerja manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) George R. Terry. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dengan maksud untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan berusaha menggambarkan serta menjelaskan kondisi objek penelitian. Pada pendekatan ini, peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan melakukan studi pada situasi yang di alami.

Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka analitis yang dibuat oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kerja Pengelolaan Layanan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Sambutan

Menindaklanjuti penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari hasil wawancara dengan partisipan penelitian, melakukan observasi di berbagai lokasi di Kelurahan Sambutan, dan meninjau dokumentasi dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan menyajikan temuan penelitian dalam sub-bab berikut:

1. Planning

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dishub telah memiliki perencanaan yang matang dan sistematis, termasuk alokasi anggaran tahunan, fokus pada jalan poros, kolaborasi dengan dinas provinsi, dan target penyelesaian satu tahun ke depan (2026). Aspek perencanaan ini sejalan dengan penelitian oleh Putra dan Mokhtar (2023), yang menyatakan bahwa pengelolaan PJU yang sukses

memerlukan perencanaan yang matang, meliputi identifikasi lokasi pencahayaan yang efisien dan penganggaran bertahap (lihat hasil penelitian yang relevan). Namun, meskipun perencanaannya matang, bagi masyarakat di Jalan Pelita 2-7, kondisi “gelap gulita” menunjukkan adanya ketidakselarasan antara dokumen rencana dengan urgensi kebutuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan tersebut mungkin tidak sepenuhnya realistis dalam hal waktu penanganan, terutama dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan teknisi yang diakui oleh Dishub.

2. Organizing

Fungsi pengorganisasian DISHUB memiliki struktur yang jelas: tanggung jawab utama di tangan pemerintah, pembagian wewenang antara DISHUB (jalan poros) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (gang/perumahan), serta melibatkan mekanisme musrembang. Namun, keterbatasan sumber daya (anggaran dan teknisi) menjadi penghambat utama, yang memaksa DISHUB membagi penanganan secara bertahap antar wilayah. Aspek ini sering menjadi kendala dalam pengelolaan infrastruktur publik di daerah, di mana keterbatasan dana menghambat implementasi teknologi dan percepatan layanan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wika (2024), yang menunjukkan bahwa hambatan utama terdiri dari Kendala Anggaran (keterbatasan sumber daya keuangan menghambat kemajuan proyek) dan Kendala Sumber Daya Manusia (kekurangan personel yang berkualitas dan mampu).

3. Actuating

Pelaksanaan (Actuating) menunjukkan kemajuan yang ada, terbukti dari realisasi APBD 2024 untuk Pelita 4-6 dan komitmen anggaran tahun depan (2026). Akan tetapi, dari sudut pandang masyarakat, pelaksanaan ini sangat lambat (responsivitas rendah), di mana perbaikan LPJU rusak bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Selain itu, buruknya layanan pengaduan dan kurangnya respon terhadap laporan menunjukkan kelemahan dalam peran fasilitatif dan edukasional DISHUB. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widyaningrum dan Galih (2024) tentang peran DISHUB dalam PJU juga menyoroti 68 pentingnya peran fasilitatif pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat, yang dalam kasus ini belum berjalan optimal.

4. Controlling

Fungsi Pengendalian merupakan titik di mana terjadi kontradiksi paling tajam. DISHUB mengklaim memiliki pengendalian yang ketat dan rutin dengan tiga regu lapangan dan patroli harian. Klaim ini sesuai dengan teori pengendalian yang harus dilakukan secara teratur untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, masyarakat menyatakan “belum pernah/jarang sekali melihat petugas DISHUB langsung turun ke lokasi untuk melakukan survei atau pendataan LPJU yang rusak”. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa:

- a. Patroli dan pengawasan tidak mencapai semua titik rawan atau tidak dilakukan di area yang dikeluhkan (Jalan Pelita 2-7).

- b. Mekanisme pengawasan internal DISHUB gagal menangkap kondisi riil dan validasi dari pengguna layanan (masyarakat).

Kontrol yang efektif sangat memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan transparansi dan memastikan penanganan sesuai kebutuhan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Kurnianingsih (2025) mengenai pengawasan PJU. Kegagalan DISHUB dalam menindaklanjuti pengaduan secara cepat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses pengawasan dan perbaikan.

5. Peran Masyarakat

Masyarakat tidak hanya menjadi penikmat, tetapi juga sensor utama yang memberikan validasi kondisi PJU, mengoreksi klaim DISHUB mengenai kecepatan respons dan kerutinan patroli. Keprihatinan masyarakat terhadap tingginya kerawanan kriminalitas dan kecelakaan akibat jalan gelap menegaskan bahwa fungsi utama PJU sebagai penunjang keselamatan dan keamanan lalu lintas belum terpenuhi di wilayah tersebut. Meskipun memiliki peran aktif (melaporkan kerusakan dan menjaga fasilitas), masyarakat kesulitan karena saluran pengaduan yang tidak efektif dan kurangnya tindak lanjut dari pihak terkait. Hal ini memperkuat temuan penelitian yang dilakukan oleh Dewaisah (2024) yang menyarankan perlunya peningkatan kualitas pelayanan, terutama pada dimensi kehandalan (reliability) dan daya tanggap (responsiveness), dalam pengelolaan LPJU.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Sambutan

Pengelolaan Layanan Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kelurahan Sambutan menghadapi kendala multidimensi yang mencakup aksi kriminalitas dan kecelakaan, cuaca buruk, serta keterbatasan operasional. Kriminalitas berupa pencurian perangkat serta insiden kecelakaan lalu lintas sering kali merusak sistem jaringan paralel yang berdampak luas hingga memadamkan 10 sampai 15 titik lampu sekaligus. Di samping itu, faktor cuaca ekstrem yang menyebabkan pohon tumbang kerap memutuskan kabel jaringan dan membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh tantangan operasional dan logistik, seperti keterlambatan penanganan akibat minimnya laporan langsung dari masyarakat pada malam hari, serta terbatasnya stok suku cadang pengganti khususnya tiang LPJU yang rusak berat sehingga memperlambat proses pemulihan layanan penerangan jalan.

Penutup

Kesimpulan

Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kelurahan Sambutan, khususnya di Jalan Pelita 2-7, masih belum optimal jika ditinjau dari fungsi manajemen inti. Pada aspek perencanaan, terdapat ketidaksesuaian antara

target anggaran 2026 dengan realitas kebutuhan lapangan, yang berdampak pada keterlambatan jadwal perbaikan. Sementara dari sisi pengorganisasian, meskipun pembagian wewenang antar-dinas sudah jelas, pelaksanaannya terhambat oleh minimnya anggaran serta keterbatasan teknis. Permasalahan ini diperparah oleh lambatnya pelaksanaan perbaikan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan akibat buruknya sistem pengaduan serta fungsi pengendalian yang belum efektif karena adanya ketidaksesuaian data laporan status perbaikan di lapangan.

Selain celah manajemen tersebut, proses pengelolaan dan percepatan pemulihan LPJU juga terhalang oleh berbagai faktor eksternal dan operasional. Tindakan kriminalitas seperti pencurian komponen serta kecelakaan lalu lintas kerap merusak fasilitas penerangan, ditambah ancaman cuaca ekstrem dan pohon tumbang yang memutus jaringan.

Saran

Untuk mengatasi hambatan di atas, berikut adalah rekomendasi solusi praktis yang dibagi berdasarkan sektor kendala:

1. Solusi Keamanan dan Perlindungan Aset
 - a. Modifikasi Desain Fisik: Pindahkan komponen vital seperti kotak baterai dan panel kontrol ke bagian paling atas tiang agar sulit dijangkau pencuri.
 - b. Manajemen Risiko Anggaran: Terapkan sistem jaminan pemeliharaan dalam kontrak vendor atau bekerja sama dengan pihak asuransi agar biaya perbaikan akibat kecelakaan tidak membebani kas daerah.
2. Solusi Antisipasi Faktor Alam
 - a. Pemangkasan Rutin (Preventif): Lakukan perampingan dahan pohon secara berkala sebelum memasuki musim hujan, khususnya pada pohon yang dekat dengan jalur kabel LPJU.
 - b. Grup Koordinasi Lintas Instansi: Buat satu saluran komunikasi cepat (grup koordinasi harian) antara tim pemotong pohon (DLH/Dinas Perumahan) dan tim teknis LPJU (Dishub) agar eksekusi di lapangan bisa dilakukan serentak tanpa saling menunggu.
3. Solusi Operasional, Logistik, dan Pengaduan
 - a. Digitalisasi Pengaduan Warga: Tempelkan stiker nomor WhatsApp pengaduan cepat beserta kode unik aset pada setiap tiang lampu. Langkah ini mempermudah warga melapor secara presisi sebelum kerusakan meluas.
 - b. Penerapan Smart Controller: Pasang sensor pintar pada panel LPJU yang mampu mengirimkan notifikasi mati lampu secara real-time ke pusat kendali. Dengan begitu, Dishub bisa tahu ada kerusakan bahkan sebelum warga melapor.
 - c. Kontrak Kerja Sama Jangka Panjang: Buat perjanjian khusus dengan pemasok lokal agar stok tiang dan suku cadang selalu siap pakai. Jika ada insiden, barang bisa langsung digunakan tanpa prosedur pengadaan yang rumit.

Daftar Pustaka

- Aris Widodo. 2009. Kajian Manajemen Optimalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang
- Dewiaisah, A. (2024). Implementasi Program Kegiatan Perawatan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Pada Jalan Parit Indah Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nugroho, Rian. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Gramedia.
- Putra, W. R., & Mokhtar, A. (2023). Studi Perencanaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penentuan Titik Lampu di Ruas Jalan Kanjeng Jimat Kabupaten Trenggalek. Jurnal Profesi Insinyur Indonesia UMM, 3(2).
- Rudini, R., Priatna, E., & Usrah, I. (2021). Analisis Pencahayaan Penerangan Jalan Umum Di Jalan Tol Kabupaten Pangandaran Dan Peluang Hemat Energi. Journal of Energy and Electrical Engineering, 3(1).
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Widiyaningrum, W. Y., & Galih, M. (2024). Peran Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Pju) Di Kabupaten Bandung. Jisipol| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(3).
- Wika, M. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Perbatasan. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 1(6), 11384-11395.